



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARANI KUTNI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 452203

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.515.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/168 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 835.000.000
3. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 187 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 1190 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 72.000.000**

1. MOBIL, XENIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, SHOGUN SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 80.250.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.248.567
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.669.498.567
III. HUTANG	Rp.	45.452.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.624.046.567

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.